

Krisis dan Tantangan Ketahanan Pangan Negara Indonesia Jika Perang Dunia III Terjadi

Rafly Aditya Rahman¹, Ikomatussuniah²

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 1111230445@untirta.ac.id

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat. Ini meliputi segala sumber daya yang diperoleh dari berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, untuk menjaga kelancaran peredaran pangan, diperlukan upaya koordinasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ini mencakup pengaturan produksi, distribusi, dan aksesibilitas pangan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, tantangan-tantangan eksternal, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan konflik bersenjata, juga dapat menghambat pemenuhan pangan.

Konflik antara Ukraina dan Rusia pada tahun 2022 menggugah ketakutan akan terjadinya krisis pangan global. Dampaknya terasa secara mendalam, terutama setelah kenaikan harga pangan yang sebelumnya dipicu oleh pandemi Covid-19 kembali meruncing karena ketegangan antarnegara tersebut. Pembatasan ekspor dan impor yang dilakukan oleh berbagai negara semakin memperburuk situasi dengan memperbesar gangguan perdagangan internasional. Indonesia, sebagai salah satu negara yang rentan terhadap fluktuasi pasar global, telah beberapa kali terjerat dalam krisis pangan yang menyebabkan kekurangan pasokan dan mendorong masyarakat untuk berbelanja panik demi memastikan kecukupan makanan bagi keluarga mereka. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh pengaruh eksternal ini, Indonesia dituntut untuk mengembangkan strategi proaktif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya situasi serupa di masa depan. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan bagi rakyatnya.

Isu mengenai potensi terjadinya Perang Dunia III saat ini memunculkan kekhawatiran global yang serius. Konflik yang telah berlangsung lama antara Iran dan Israel kembali menghangat, dengan ancaman potensial untuk eskalasi menjadi konflik yang lebih besar. Kedua negara tersebut memiliki dukungan dari berbagai pihak, baik secara politis maupun militer, yang semakin memperkuat ketegangan di kawasan tersebut.

Dampak dari ketegangan ini tidak hanya terbatas pada wilayah tersebut, tetapi juga merambah ke pasar global, termasuk perdagangan bebas ekspor-impor pangan antarnegara. Gangguan dalam perdagangan internasional dapat mengakibatkan kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan, mempengaruhi stabilitas pangan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Indonesia, sebagai negara yang mengimpor sebagian besar kebutuhan pangan, tidak dapat menghindari dampak dari ketegangan geopolitik seperti ini. Pembatasan ekspor dan impor yang mungkin diberlakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik dapat mengganggu rantai pasok pangan global, menyebabkan peningkatan harga dan kelangkaan di pasar internasional. Akibatnya, Indonesia sebagai importir pangan akan menghadapi tekanan dalam memastikan pasokan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakatnya.

Dikutip dari laman detik.com, situasi impor pangan di Indonesia menjadi sorotan penting dalam konteks ketahanan pangan nasional. Meskipun Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, masih terdapat kebutuhan yang signifikan akan impor dari negara-negara lain, termasuk beras, daging sapi, jagung, dan bawang putih. Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan pola konsumsi masyarakat, kendala dalam produksi lokal, serta ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar domestik.

Negara-negara yang terlibat dalam konflik atau yang terpengaruh secara tidak langsung oleh ketegangan geopolitik tersebut mungkin akan memberlakukan pembatasan impor sebagai bagian dari strategi politik atau sebagai respons terhadap tekanan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara yang bergantung pada impor pangan akan terkena dampaknya secara langsung.

Indonesia masih membutuhkan impor beras dan daging sapi dari beberapa negara, seperti Thailand untuk beras, dan berbagai negara untuk daging sapi. Begitu juga dengan bawang putih dari China, dan jagung yang diimpor dari negara-negara seperti Argentina, Thailand, Amerika Serikat, dan India. Pembatasan impor dari negara-negara tersebut dapat mengganggu pasokan pangan di Indonesia, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga, yang pada gilirannya akan memberikan tekanan tambahan pada pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan harga pangan yang stabil bagi masyarakat.

Menurut penulis, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki peran utama dalam menjaga kestabilan ketahanan pangan bagi masyarakat. Peran ini meliputi pembuatan kebijakan dan regulasi yang memastikan pasokan pangan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan produksi lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan rencana alternatif yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin timbul akibat faktor eksternal, seperti konflik atau perang.

Memberlakukan kebijakan terobosan menjadi suatu keharusan. Ini mencakup inovasi dalam sistem pertanian, pengembangan teknologi, serta pelaksanaan program yang mendorong kemandirian pangan. Kebijakan yang proaktif dan adaptif akan memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi dan merespons perubahan yang terjadi dengan cepat, sehingga menjaga stabilitas pasokan pangan dalam kondisi apapun.

Selain itu, penyusunan rencana alternatif juga menjadi hal yang penting. Pemerintah perlu memiliki strategi cadangan yang dapat diaktifkan dalam situasi darurat, termasuk skenario untuk mengatasi kemungkinan kelangkaan pasokan akibat perang atau konflik. Rencana ini

harus mencakup langkah-langkah konkret seperti pengadaan cadangan pangan, distribusi darurat, dan koordinasi antara berbagai lembaga terkait.